

Rasionalitas Penggunaan Hak Suara Pemilih Pemula Kota Surabaya dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024

Zafran Syafiq Shobha Winokan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya
Email: zafransyafiq.21031@mhs.unesa.ac.id

Muhammad Falih Iqbal

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya
Email: muhammadfalih.21022@mhs.unesa.ac.id

Agus Machfud Fauzi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya
Email: agusmfauzi@unesa.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi rasionalitas penggunaan hak suara pemilih pemula di Kota Surabaya dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi yang bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui tahap observasi, wawancara mendalam, serta ditunjang dengan studi kepustakaan yang bersumber dari jurnal, buku, skripsi, dan dokumen lain yang relevan dengan tujuan penelitian. Teori rasionalitas Max Weber digunakan dalam penelitian ini untuk menjadi pisau analisis, sebab teori rasionalitas Max Weber berusaha melihat dasar tindakan individu melalui beberapa tahapan ideal. Hasil penelitian yang didapatkan ialah rasionalitas penggunaan hak suara pemilih pemula di Kota Surabaya didasarkan pada aspek kepribadian, pendidikan, prestasi, visi dan misi, rekam jejak, program kerja, dan kemampuan berbahasa yang baik dan cenderung mengabaikan latar belakang agama, ras, suku, etnis, jenis kelamin, dan budaya tiap pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Hambatan dan tantangan yang harus dihadapi oleh para calon Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilihan umum 2024 adalah merosotnya kepercayaan publik terhadap pemerintahan, kompleksitas permasalahan masyarakat Indonesia semenjak pandemi Covid-19, dan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).

Kata Kunci: Rasionalitas, Pemilih Pemula, Hak Suara, Pemilihan Umum

Abstract

This research aims to identify the rationality of first-time voters' use of their voting rights in Surabaya during the 2024 presidential and vice-presidential elections. The study employs a qualitative approach with a descriptive phenomenological method. Data collection was conducted through observation, in-depth interviews, and supported by literature studies sourced from journals, books, theses, and other relevant documents related to the research objectives. Max Weber's theory of rationality is used in this study as an analytical tool, as it

seeks to understand the basis of individual actions through several ideal stages. The findings indicate that the rationality behind first-time voters' use of their voting rights in Surabaya is based on personality aspects, education, achievements, vision and mission, track record, work programs, and proficiency in language, while tending to ignore the religious, racial, ethnic, gender, and cultural backgrounds of each presidential and vice-presidential candidate. The obstacles and challenges that presidential and vice-presidential candidates must face in the 2024 elections include declining public trust in the government, the complexity of social issues in Indonesia since the Covid-19 pandemic, and advancements in Science and Technology (IPTEK).

Keywords: Rationality, Novice Voters, Voting Rights, General Elections

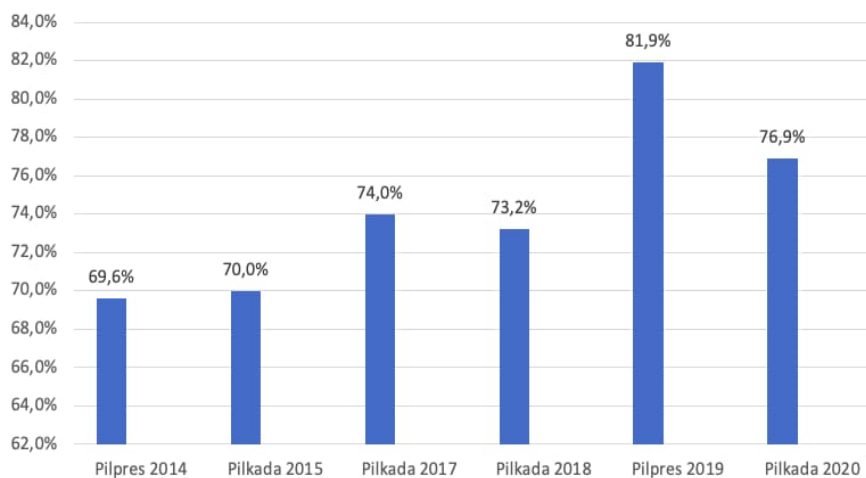
PENDAHULUAN

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah instrumen penting dalam sistem demokrasi Indonesia yang diselenggarakan setiap 5 tahun sekali. Di Indonesia, seluruh tatanan hukum dan politik berlandaskan pada prinsip kedaulatan rakyat, sesuai dengan semangat Pembukaan UUD 1945 yang menegaskan bahwa kemerdekaan Indonesia diwujudkan dalam bentuk negara yang berkedaulatan rakyat. Konsep demokrasi, menurut pemikiran John Locke dan Rousseau, menekankan pada jaminan kebebasan, keadilan, dan kesetaraan bagi setiap individu di berbagai aspek kehidupan (Bachtiar, 2014). Ini berarti kekuasaan tertinggi negara berada di tangan rakyat, dengan UUD sebagai pedoman, sambil tetap menghormati hak-hak warga negara. Pemilu, sebagai manifestasi pesta demokrasi, dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip yang tertuang dalam UU Pemilu No.7 Tahun 2017 Pasal 2, yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Prinsip-prinsip ini menjamin bahwa hak suara setiap warga negara bersifat personal dan terbebas dari segala bentuk intervensi, sebagai perwujudan dari pemenuhan hak-hak warga negara.

Dengan asas demokrasi Indonesia, rakyat memiliki wewenang untuk memilih secara langsung para pejabat eksekutif dan legislatif melalui Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Sejarah Pemilu di Indonesia dimulai pada tahun 1955 dengan pemilihan anggota DPR dan Konstituante. Sementara itu, pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung baru terlaksana pada tahun 2004, yang menghasilkan kemenangan untuk pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla. Pemilu 2004 memiliki nilai strategis sebagai momentum politik yang menentukan arah masa depan Indonesia, khususnya dalam upaya menjauhkan bangsa dari ancaman anarki, kekerasan politik, dan praktik-praktik tidak bermoral (Malian, 2004). Dalam konteks ini, tingkat

partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya menjadi faktor penting yang turut mempengaruhi masa depan bangsa. Pemilihan umum tidak sekadar merupakan agenda politik yang dijalankan oleh kalangan Elit dan pejabat negara. Lebih dari itu, Pemilu adalah perwujudan dari demokratisasi negara yang mengedepankan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan kebebasan. Sebagaimana dikemukakan Wardhani (2018), tingkat partisipasi politik masyarakat dapat dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan implementasi sistem politik yang demokratis.

Gambar 1. Tingkat Partisipasi Pemilih di 6 Pemilihan Terakhir

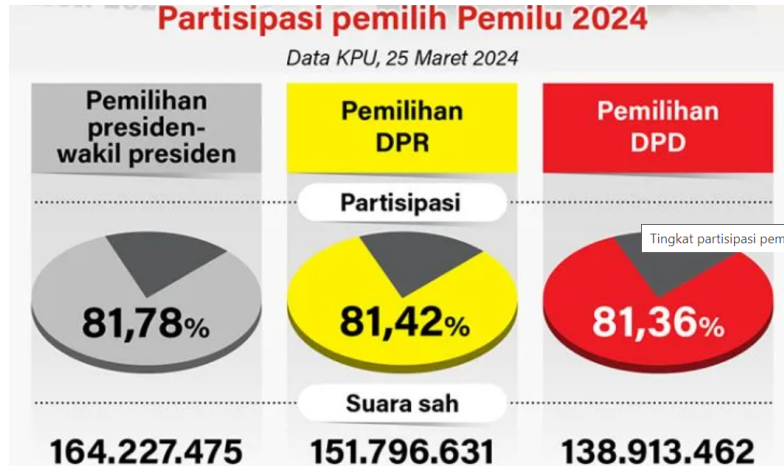


(2014-2020) Sumber: <https://setkab.go.id>

Sepanjang enam Pemilu dan Pilkada (2014-2020) telah mengalami peningkatan partisipasi pemilih. Pada pemilihan presiden dan wakil presiden di tahun 2014, partisipasi pemilih mencapai angka 69,6% dan mengalami peningkatan di tahun 2019 yang mencapai 81,9%. Peningkatan signifikan partisipasi pemilih juga terjadi pada pemilihan kepala daerah di tahun 2020 yang mencapai 76,9% dari tahun 2018 yang hanya mencapai 73,2%. Pada Pemilu 2024 tingkat partisipasi pemilih menunjukkan hasil yang sangat positif dan konsisten di ketiga jenis pemilihan. Dalam pemilihan presiden dan wakil presiden, tingkat partisipasi mencapai 81,78% dengan total suara sebanyak 164.227.475. Sementara itu, pemilihan DPR mencatatkan partisipasi sebesar 81,42% dengan 151.796.631 suara, dan pemilihan DPD dengan partisipasi 81,36% menghasilkan 138.913.462 suara. Jika dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya, tren partisipasi pemilih menunjukkan peningkatan yang signifikan. Dari Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 yang hanya mencapai 69,6%, terjadi lonjakan substansial ke angka 81,9% pada Pilpres 2019, dan kemudian relatif stabil di angka 81,78% pada Pilpres 2024. Stabilitasnya angka partisipasi di kisaran 81% untuk ketiga jenis

pemilihan menandakan bahwa tingkat partisipasi pemilih Indonesia telah mencapai titik optimal yang konsisten.

Gambar 1.2 Tingkat Partisipasi Pemilihan Umum Tahun 2024



Sumber: <https://www.antaraneews.com>

Peningkatan partisipasi pemilih menjadi indikator tingginya antusiasme masyarakat Indonesia selama Pemilu dan Pilkada di tujuh pemilihan terakhir. Peningkatan partisipasi politik oleh pemilih disebabkan oleh tingginya kepercayaan politik melalui kepuasan demokrasi (Wahyudi et al., 2013). Kesadaran dan pengetahuan akan politik juga dapat memengaruhi partisipasi politik di suatu wilayah. Pengetahuan politik dapat dibangun melalui sosialisasi, pendidikan, maupun pengalaman politik. Penelitian Asmadi et al. (2021) menjelaskan bahwa masyarakat dengan status sosial dan ekonomi yang tinggi memiliki pengetahuan, minat, serta perhatian terhadap politik dan kepercayaan terhadap pemerintah. Perkembangan zaman dan teknologi juga turut berperan dalam meningkatkan kesadaran dan pengetahuan politik masyarakat. Partisipasi politik juga didorong oleh rangsangan politik yang diterima melalui media massa, media televisi, media sosial, iklan-iklan, serta diskusi publik informal di lingkungan sekitar (Ramadhani, 2021).

Berbagai masalah kemiskinan, pengangguran, pembangunan, dan lain-lain yang terjadi pasca-pandemi Covid-19 menjadi suatu perhatian lebih oleh masyarakat dalam mencapai legitimasi pemerintahan. Pemilihan umum 2024 menjadi agenda politik yang krusial dalam menentukan nasib negara ke depannya. Kurangnya antusias masyarakat karena minimnya kesadaran, pengetahuan, pengalaman, sosialisasi politik, dan kurang profesionalnya penyelenggara Pemilu dikhawatirkan akan menghambat perjalanan menuju

pemilihan umum 2024 (Lestari & Arumsari, 2018; Sulistyowati et al., 2021). Selain itu, ideologi partai yang lemah, kaderisasi yang tidak optimal, pendanaan partai, serta persaingan antar partai politik di tengah era disrupsi juga menjadi tantangan bagi partai politik dalam menghadapi pemilihan umum 2024 (Aji & Indrawan, 2020; Barokah & Hertanto, 2022). Partisipasi politik dalam pemilihan umum 2024 harus ditingkatkan dengan membentuk kepercayaan politik dan kepuasan demokrasi masyarakat Indonesia.

Penelitian Hanafi et al. (2018) menjelaskan bahwa rasionalitas pemilih pemula di SMA Negeri 1 Kotagajah dalam Pilkada Gubernur Lampung 2018 didasarkan pada program kerja, agama, dan pendidikan calon gubernur dan wakil gubernur. Adapun penelitian Wance & Suhu (2019) menjelaskan bahwa pemilih pemula rasional di Daerah Maluku Utara cenderung mengabaikan latar belakang agama dan suku kandidat kepala daerah. Figur kandidat seperti kredibilitas, kemampuan dan kepribadian, serta program kerja yang bersangkutan dengan kesejahteraan masyarakat menjadi dasar penting dalam menentukan keputusan memilih pemilih pemula. Faktor kehendak keluarga juga turut memengaruhi sikap pemilih pemula yang dilematis dan belum dapat menentukan pilihannya. Selain itu, partisipasi politik pemilih pemula juga didorong oleh sosialisasi politik, dorongan *peer group*, pengalaman organisasi, hingga politik uang dan pemberian secara materiil (Astanti & Mudzakkir, 2016). Dengan demikian, menandakan bahwa terdapat dinamika dalam proses penggunaan hak suara pemilih pemula yang perlu ditelusuri lebih dalam, untuk menilai sejauh mana kualitas demokrasi terus berjalan.

Dengan uraian latar belakang di atas, peneliti berupaya mengidentifikasi rasionalitas pemilih pemula Kota Surabaya dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2024 di tengah tantangan dan hambatan demokrasi yang terjadi di Negara Indonesia, terlebih semenjak pandemi Covid-19 yang menghadirkan berbagai masalah politik, sosial, agama, ekonomi, dan lain-lain. Penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat Indonesia, khususnya Kota Surabaya dalam memandang dan mengkritisi dinamika pemilihan umum dari tahun ke tahun, sehingga pengalaman dan pengetahuan politik dapat ditingkatkan serta tersalurkan dengan cermat dan tepat dalam penelitian ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dengan metode fenomenologi. Kualitatif yang bersifat deskriptif menurut Sugiyono (2007)

merupakan metode penelitian dengan paradigma filsafat post-positivisme, dipergunakan dalam penelitian yang bersifat objektif dan peneliti memiliki kedudukan sebagai instrumen kunci. Fenomenologi Schutz berusaha mengetahui cara orang memahami kesadaran individu atas pengalaman-pengalaman di dalam dunia intersubjektif (Ritzer, 2012).

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Surabaya dengan mengambil 8 informan sebagai sumber data dan informasi. Dalam menentukan informan, peneliti menggunakan metode purposive sampling, yakni pemilihan subjek penelitian berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria yang ditetapkan adalah remaja Surabaya yang akan menggunakan hak pilihnya untuk pertama kali dalam Pemilu presiden dan wakil presiden 2024. Pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode: observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Dokumentasi meliputi studi kepustakaan dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, skripsi, dan tesis. Untuk menganalisis data, peneliti mengadopsi metode analisis fenomenologi yang dikembangkan oleh Bogdan dan Taylor, yang bertujuan mencapai pemahaman mendalam melalui kombinasi pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Menurut Bogdan & Taylor (1992), analisis fenomenologi terbagi dalam tiga fase: tahap pra-lapangan, tahap di lapangan, dan tahap pasca-lapangan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena secara sistematis dan menyeluruh.

Penelitian ini menggunakan perspektif teori rasionalitas Max Weber sebagai pisau analisis. Teori Weber memfokuskan perhatiannya pada tindakan individual, mengkaji pola-pola perilaku, serta regularitas tindakan yang dapat diinterpretasikan secara subjektif maupun sebagai manifestasi perilaku personal. Penggunaan teori Weber dalam penelitian ini dipandang relevan karena dapat membantu mengungkap dan memahami dasar-dasar pemikiran rasional di balik keputusan pemilih pemula dalam menggunakan hak suara mereka pada pemilihan presiden dan wakil presiden 2024.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Identitas dan Kepribadian Calon Presiden dan Wakil Presiden 2024

Identitas diri dan kepribadian seorang calon pemimpin menjadi aspek penting di balik rasionalitas pemilih pemula Kota Surabaya. Tak jarang calon pemimpin menjadikan identitas diri sebagai alat politik dalam kampanye. Hal ini sering disebut sebagai politik identitas yang mana identitas agama, ras, etnis, suku, dan budaya dijadikan sebagai strategi politik dalam agenda Pemilihan Umum. Politik identitas dipergunakan sebagai alat manipulasi untuk

menggalang dan memenuhi kepentingan politik maupun ekonomi (Haboddin, 2012). Politik identitas yang menjamur akan menghilangkan asas demokrasi yang dianut oleh Bangsa dan Negara Indonesia sendiri. Politik identitas akan menghadirkan paradigma intoleransi bahkan diskriminasi mengenai 'saya yang Islam' dan 'kalian yang Kristen', 'saya yang Jawa' dan 'kalian yang Batak', hingga 'saya yang berkulit putih' dan 'kalian yang berkulit hitam'.

Politik identitas dapat direduksi dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dengan mengalihkan orientasi pemilihan calon pemimpin yang lebih rasional dan tidak hanya didasarkan pada identitas saja. Pemilih pemula Kota Surabaya mengesampingkan aspek identitas calon presiden dan wakil presiden dalam penggunaan hak suaranya pada Pemilu 2024. Penggunaan hak suara tidak didasarkan pada agama, jenis kelamin, suku, ras, dan etnis calon pemimpin, melainkan memandang visi dan misi, program kerja, dan rekam jejak sebagai aspek fundamental. Hasil ini sesuai dengan penelitian Azmi et al. (2016) yang mengungkapkan nyatanya pemilih pemula tidak mudah terpengaruh oleh ajakan orang lain serta cenderung memandang visi, misi, dan program kerja sebagai indikator kelayakan seorang pemimpin. Dalam penelitiannya menjelaskan bahwa rasionalitas pemilih pemula dipengaruhi oleh faktor pendidikan yang tinggi.

Pemilih pemula Kota Surabaya skeptis dan tidak apatis terhadap keberlangsungan Pemilu 2024. Hal ini dapat dibuktikan dengan antusiasme dan pengetahuan politik yang memadai dengan mengkritisi tujuan, rencana, dan arah kebijakan yang akan diambil oleh calon presiden dan wakil presiden 2024. Menimbang kelogisan apakah visi dan misi serta program kerja dapat dicapai atau hanya delusional yang berlebihan. Pemilih pemula juga visioner terhadap keberlangsungan pemerintahan ke depannya, memandang rekam jejak yang jelas dan baik agar negara Indonesia dapat dipimpin oleh pemimpin yang dapat menyelesaikan permasalahan serta keresahan masyarakat Indonesia secara efektif dan efisien. Calon presiden dan wakil presiden 2024 harus dapat meningkatkan kepercayaan politik masyarakat yang semakin memudar. Stigma masyarakat terhadap politik yang kotor, jahat, dan menghalalkan segala cara dikhawatirkan akan membentuk masyarakat yang apatis terhadap keberlangsungan politik dan pemerintahan negara. Runtuhnya kepercayaan politik membuat masyarakat enggan untuk menggunakan hak suara (Arianto, 2011).

Elektabilitas dan kapabilitas pemimpin juga turut memengaruhi kepercayaan politik dan kepuasan demokrasi pemilih pemula, sehingga perlu adanya peningkatan kualitas calon pemimpin yang akan menjadi penggerak roda perubahan ke arah yang lebih baik. Pemilih

pemula Kota Surabaya memandang kepribadian seorang calon presiden dan wakil presiden 2024 sebagai aspek penting. Pemilih pemula Kota Surabaya memimpikan sosok pemimpin yang berkarisma, bertanggung jawab, berwibawa, tegas, dan revolusioner. Karisma merupakan suatu kekuatan revolusioner internal yang mengubah pikiran para aktor, Max Weber memandang rasionalitas formal sebagai kekuatan revolusioner eksternal yang mulanya mengubah struktur-struktur masyarakat dan akhirnya mengubah pikiran-pikiran dan tindakan-tindakan individu (Ritzer, 2012). Max Weber percaya dengan struktur otoritas karismatik akan mengubah pemikiran dan tindakan masyarakat secara dramatis.

Kepribadian calon pemimpin menjadi salah satu yang memengaruhi rasionalitas pemilih pemula di Kota Surabaya. Salah satu pemilih pemula mengungkapkan bahwa lebih tertarik dengan kepribadian yang dominan aksi daripada hanya sekadar basa-basi. Pemilih pemula menagih bukti nyata dari sosok calon seorang pemimpin bukan hanya sekadar rangkaian kata visi dan misi belaka. Dengan terjun langsung ke lapangan, melihat kehidupan masyarakat, mendengar aspirasi masyarakat membuat pemilih pemula lebih berempati. Bagi pemilih pemula, politik bukan hanya sebagai jalan kekuasaan, melainkan jalinan kepedulian antara pemimpin dan masyarakat. Hal ini yang disebut Max Weber sebagai rasionalitas afektif sebagai tindakan yang dilakukan atas respons emosional yang terjadi tanpa proses dan pertimbangan yang logis (Erfan, 2021).

Identitas dan kepribadian selalu identik dan tidak pernah terlepas dari kehidupan individu. Namun, pemilih pemula Kota Surabaya cenderung mengabaikan identitas calon pasangan Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilihan umum 2024. Identitas diri pemimpin tidak lagi berarti dalam politik. Pemimpin bukan lagi tentang perempuan atau laki-laki, Jawa atau Madura, hitam atau putih, maupun Islam atau Katolik. Pemimpin menurut pemilih pemula Kota Surabaya adalah pemimpin yang visioner, tanggap, dan bertanggung jawab. Hal ini yang disebut sebagai kepribadian yang menyangkut emosional, sikap, sifat, dan pola pikir. Rasionalitas pemilih pemula dalam penggunaan hak suara dalam pemilihan umum 2024 tidak lagi dipengaruhi oleh politik identitas dan politik uang yang sifatnya transaksional dan keuntungan sesaat. Politik transaksional atau politik uang cenderung terjadi di masyarakat tradisional, masyarakat dengan pendidikan yang rendah, serta masyarakat dengan ekonomi yang terbatas (Fitriani et al., 2019; Maretha, 2020).

Bagi pemilih pemula Kota Surabaya kredibilitas calon pemimpin tidak dapat dilihat melalui latar belakang suku, agama, ras, etnis, ataupun jenis kelamin. Kredibilitas calon

pemimpin menurut pemilih pemula Kota Surabaya dapat dinilai dari latar belakang pendidikan dan rekam jejak kepemimpinan calon Presiden dan Wakil Presiden. Selain latar belakang pendidikan, pemilih pemula juga memandang prestasi dan kemampuan berbahasa yang baik sebagai indikator kelayakan seorang pemimpin. Dengan demikian, seiring berkembangnya zaman dan teknologi, indikator kelayakan seorang pemimpin tidak lagi dinilai melalui latar belakang identitas saja, melainkan pendidikan, prestasi, dan track record. Pendidikan politik yang semakin komprehensif menggeser budaya dan mengubah pola pikir masyarakat dalam menilai seorang pemimpin yang layak. Kecerdasan dan kekayaan intelektual seorang pemimpin menjadi faktor penting dalam memengaruhi penggunaan hak suara pemilih pemula Kota Surabaya.

Latar Belakang Politik Calon Presiden dan Wakil Presiden 2024

Dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden bab 1 ayat 4 menyatakan bahwa partai politik atau gabungan partai politik yang telah memenuhi syarat dapat mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Dengan demikian, dinamika Pemilu 2024 tidak dapat terlepas melalui keterlibatan partai politik. Latar belakang politik calon presiden dan wakil presiden turut memengaruhi rasionalitas memilih pemilih pemula di Kota Surabaya. Beberapa pemilih pemula cenderung memandang kelayakan calon presiden dan wakil presiden dari aspek partai politik pengusungnya. Penelitian Jati (2022) mengungkapkan terdapat 3 faktor yang memengaruhi sikap dan persepsi pemilih mengenai kandidat dan partai politik yang maju dalam Pemilu 2019, yakni performa pemerintahan, skandal politik, dan polarisasi identitas.

Pemilih pemula Kota Surabaya tidak menutup mata mengenai historis pemerintahan sebelumnya, bagaimana kinerja kader-kader partai politik menjalankan roda pemerintahan di badan eksekutif dan legislatif. Hal tersebut terakumulasi dan tergeneralisir dalam persepsi pemilih pemula di Kota Surabaya. Beberapa pemilih pemula Kota Surabaya tidak lagi memandang siapa yang akan mencalonkan, tetapi siapa yang mengusung pasangan calon. Beberapa kader partai politik yang terkesan arogan dan kasar akan membentuk *labelling* masyarakat terhadap partai politik itu sendiri, sehingga hal ini akan berpengaruh dalam penggunaan hak suara mereka dalam Pemilihan Umum 2024. Pemilih pemula Kota Surabaya cenderung tidak akan memilih calon presiden dan wakil presiden yang diusung oleh partai politik tertentu yang telah memiliki *labelling* buruk di mata masyarakat.

Labelling buruk masyarakat terhadap partai politik tertentu menghadirkan tantangan tersendiri bagi partai politik dalam menyusun strategi dalam agenda pemilihan umum ke depannya. Dengan demikian, partai politik dituntut untuk menyelaraskan orientasi politiknya dengan kehidupan masyarakat Indonesia karena masyarakat rasional menimbang atas keuntungan dan kerugian yang ditawarkan oleh calon pasangan dan partai politik (Mansyur, 2020). Pemilih pemula rasional tidak lagi mudah percaya akan berita hoax, politik identitas, bahkan politik uang. Sebab pemilih pemula di Kota Surabaya memandang bahwa pemilihan umum merupakan agenda politik yang tidak boleh dibumbui oleh asas transaksional yang tidak bermoral dan jauh dari asas demokratis.

Rasionalitas pemilih pemula di Kota Surabaya juga dipengaruhi oleh perkembangan zaman dan teknologi. Perkembangan zaman dan teknologi mempermudah pemilih pemula dalam mengakses dan menambah pengetahuan mereka akan politik itu sendiri. Namun, pemilih pemula cenderung mengkritisi isu-isu dan informasi yang disampaikan melalui media massa agar terbebas dari informasi palsu. Masalah ini seharusnya menjadi evaluasi bagi partai politik yang ingin melakukan praktik kotor dan curang dalam pemilihan umum 2024. Sebab para pemilih tidak lagi dapat dibutakan oleh hal-hal materiil, tetapi melihat kredibilitas calon pasangan presiden dan wakil presiden. Partai politik yang mendukung kandidat calon pasangan hendaknya menyusun strategi yang berorientasi pada kebutuhan dan keinginan masyarakat, dengan membentuk citra yang baik, menghilangkan arogansi, kekerasan politik, dan tindakan yang amoral.

Strategi partai politik akan berjalan dengan baik apabila didukung dengan sosialisasi politik yang komprehensif. Salah satu pemilih pemula Kota Surabaya menjelaskan bahwa aspek sosialisasi yang dibentuk oleh calon pemimpin merupakan faktor penting dalam meningkatkan kesadaran politik pemilih pemula di Kota Surabaya. Kesadaran politik pemilih pemula Kota Surabaya dibentuk melalui sosialisasi secara langsung maupun media sosial. Empati calon pemimpin menjadi salah satu penentu penggunaan hak suara pemilih pemula. Hal ini disebabkan oleh pengetahuan politik yang sudah cukup dimiliki oleh pemilih pemula di Kota Surabaya. Pemilih pemula yang kritis membutuhkan kinerja yang nyata dari sosok calon pemimpin dan tidak dapat dibohongi bahkan dibodohi dengan rangkaian kata dan ucapan saat kampanye. Pemilih pemula cenderung kritis karena telah memasuki masa transisi remaja menuju dewasa. Pemilih pemula yang kritis tentu akan menggunakan hak suara dengan menganalisis dan turut mengkritisi kinerja pemerintah (Lestari & Arumsari, 2018).

Hambatan dan Tantangan Calon Presiden dan Wakil Presiden 2024

Selama pemerintahan sebelumnya menjadi indikator penilaian pemilih pemula Kota Surabaya terhadap kinerja para pemangku kepentingan terlebih Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu, calon pasangan Presiden dan Wakil Presiden 2024 mendapati banyaknya hambatan dan tantangan di tengah dinamika perpolitikan dan pemerintahan. Salah satu hambatan yang paling krusial ialah mengenai kepercayaan publik terhadap pemerintah. Kinerja pemerintah yang dinilai masih belum dapat memuaskan masyarakat dapat menghambat keberlangsungan pemilihan umum 2024. Hilangnya kepercayaan publik akan mengakibatkan para pemilih tidak menggunakan hak suaranya sebagai hak warga negara. Hal ini dapat disebabkan oleh pengkhianatan, skandal, serta tindakan-tindakan yang justru kontradiktif dengan konstitusi. Kasus korupsi yang justru dilakukan oleh pemimpin-pemimpin dikhawatirkan akan menggerus kepercayaan publik. Penurunan kepercayaan publik pada pemerintah juga dapat disebabkan oleh kegagalan pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya (Prasetyo & Kriswibowo, 2022). Pandemi Covid-19 yang menyerang seluruh negara, salah satunya Negara Indonesia menjadi perhatian serius bagi masyarakat dalam menilai kinerja pemerintah dalam menangani berbagai masalah. Ketanggapan pemerintah Indonesia dalam menangani berbagai masalah yang kompleks semenjak Pandemi Covid-19 akan memengaruhi tingkat legitimasi masyarakat. Masalah kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, dan masalah lainnya menjadi tantangan tersendiri bagi para calon pasangan Presiden dan Wakil Presiden yang akan maju pada Pemilu 2024. Program kerja yang diusung idealnya dikhususkan untuk mengentas permasalahan yang terjadi semenjak pandemi.

Ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin berkembang menjadi tantangan tersendiri pada Pemilu 2024. Era digital membawa perubahan sosial dan budaya yang signifikan. Penyebaran berita palsu (*hoax*) dan isu-isu negatif dalam Pemilu 2024 menjadi tantangan dan hambatan tersendiri di tengah era disrupsi. Para pemilih pemula sadar akan pentingnya penggunaan teknologi secara cerdas dalam Pemilu 2024. Pemilih pemula dengan pendidikan yang tinggi cenderung mengkritisi berita dan isu-isu politik di media massa, sehingga terhindar dari jebakan berita *hoax* yang menyesatkan. Seyogyanya penggunaan teknologi dalam Pemilu diperlukan untuk meyakinkan kepercayaan dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam agenda Pemilu (Mahpudin, 2019). Pemilih pemula yang cerdas dan kritis akan menghambat Presiden dan Wakil Presiden yang hanya memiliki kepentingan

pribadi ataupun kelompok. Hal itu disebabkan pemilih pemula tidak dapat lagi didoktrin dengan iming-iming politik tertentu, terlebih yang sifatnya transaksional.

Dengan kemajuan teknologi, para pemilih pemula dengan mudahnya mengakses segala informasi pribadi maupun segala latar belakang calon Presiden dan Wakil Presiden, sehingga informasi yang akurat dapat diakses penuh oleh masyarakat. Era disrupsi mendorong terjadinya perubahan pada sistem politik. Perkembangan teknologi akan memunculkan inovasi yang menginspirasi digitalisasi politik, seperti transisi kampanye massa menjadi edukasi via media massa yang lebih efisien, efektif, dan mudah dijangkau oleh siapa pun (Bashori, 2018). Kecanggihan teknologi juga akan meminimalisir kecurangan, seperti pengendalian hak suara rakyat yang dipergunakan untuk kepentingan ekonomi dan politik salah satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Perkembangan zaman dan teknologi mengiringi dinamika politik di negara Indonesia. Keterbukaan akses dan informasi memudahkan siapa pun untuk mendapatkan pengetahuan politik di media massa, sehingga hal ini akan meminimalisir kecurangan dan pembodohan publik. Penggunaan teknologi yang tepat dapat dimanfaatkan untuk meminimalisir kecurangan Pemilu serta meningkatkan kepercayaan publik (Kersting & Baldersheim, 2004).

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Rasionalitas pemilih pemula di Kota Surabaya dalam penggunaan hak suara pada pemilihan umum 2024 didasarkan pada beberapa aspek, antara lain kepribadian, pendidikan, prestasi, visi dan misi, rekam jejak, program kerja, dan kemampuan berbahasa yang dimiliki oleh tiap pasangan Presiden dan Wakil Presiden. Temuan ini diklasifikasikan Max Weber dalam rasionalitas instrumental, rasionalitas nilai, dan rasionalitas afektif. Pemilih pemula Kota Surabaya cenderung mengabaikan latar belakang agama, ras, suku, etnis, jenis kelamin, dan budaya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden karena hal tersebut tidak dapat menjadi indikator kelayakan seorang pemimpin. Latar belakang partai politik calon Presiden dan Wakil Presiden juga turut memengaruhi rasionalitas pemilih pemula Kota Surabaya. Pemilih pemula cenderung menghindari partai politik yang memiliki citra dan rekam jejak yang buruk.

Hambatan dan tantangan yang perlu dihadapi para Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu 2024 adalah merosotnya kepercayaan publik terhadap pemerintahan. Selain itu,

berbagai kompleksitas permasalahan masyarakat Indonesia semenjak pandemi yang harus dituntaskan segera menjadi tantangan serius bagi calon pasangan terpilih. Perkembangan IPTEK juga turut mengiringi dinamika politik dan pemilihan umum 2024. Persebaran informasi dan isu-isu politik yang kian cepat harus dikritisi agar terhindar dari berita *hoax*. Selain itu perkembangan zaman dan teknologi juga dapat meminimalisir terjadinya kecurangan dan pembodohan publik yang dilakukan oleh elit-elit negara.

Saran

Studi mengenai rasionalitas pemilih pemula dalam penggunaan hak suara harus terus dikembangkan untuk dapat melihat kondisi sosial dan politik yang timbul di masyarakat. Studi ini hanya terbatas pada rasionalitas pemilih pemula di Kota Surabaya yang tentu memiliki kekurangan pada faktor-faktor yang memengaruhi rasionalitas itu sendiri. Studi ini menemukan kemungkinan adanya pengaruh pendidikan, budaya, dan ekonomi dalam rasionalitas penggunaan hak suara pemilih pemula Kota Surabaya pada Pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024. Oleh sebab itu, studi mendatang diharapkan mampu menjelaskan faktor-faktor tersebut melalui berbagai pendekatan metodologis sesuai dengan lingkungan perkotaan atau pedesaan yang tentu memiliki karakteristik tersendiri. Studi ini diharapkan juga dapat membantu akademisi, politisi, hingga masyarakat umum dalam memahami situasi sosial dan politik saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, M. P., & Indrawan, J. (2020). Hambatan dan Tantangan Partai Politik: Persiapan Menuju Pemilihan Umum 2024. *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama*, 8(2), 213–229.
- Arianto, B. (2011). Analisis Penyebab Masyarakat Tidak Memilih Dalam Pemilu. *Jurnal Ilmu Politik Dan Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 51–60.
- Asmadi, R. B., Djafar, L., & Lukum, R. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingginya Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Unone, Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah Tahun 2019. *Jambura Journal Civic Education*, 1(1), 21–28. <https://doi.org/10.37905/jacedu.v1i1.11132>
- Astanti, D., & Mudzakkir, M. (2016). Rasionalitas Politik Pemilih Pemula di Tegalsari Surabaya. *Paradigma*, 4(1), 1–8.
- Azmi, K., Astuti, P., & Fitriyah. (2016). Perilaku Memilih Pemilih Pemula Masyarakat Kendal Pada Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Undip*, 5(3), 362–370.
- Bachtiar, F. R. (2014). Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi Dari Berbagai Representasi. *Jurnal Politik Profetik*, 3(1), 1–17. <https://doi.org/10.24252/profetik.v2i1a3>

- Barokah, F., & Hertanto. (2022). Disrupsi Politik: Peluang dan Tantangan Partai Politik Baru Jelang Pemilu 2024. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 21(1), 1–13. <https://doi.org/10.35967/njip.v21i1.273>
- Bashori, K. (2018). Pendidikan Politik di Era Disrupsi. *SUKMA: Jurnal Pendidikan*, 2(2), 287–310.
- Bogdan, R. C., & Taylor, S. J. (1992). *Research Methods : A Phenomenological Approach in the Social Sciences* (A. Furchan, J. Wiley, & Sons (eds.)). Surabaya: Usaha Nasional.
- Erfan, M. (2021). Spirit Filantropi Islam dalam Tindakan Sosial Rasionalitas Nilai Max Weber. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 4(1), 54–64. <https://doi.org/10.36778/jesya.v4i1.281>
- Fitriani, L. U., Karyadi, L. W., & Chaniago, D. S. (2019). Fenomena Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat. *Resiprokal*, 1(1), 53–61.
- Haboddin, M. (2012). Menguatnya Politik Identitas di Ranah Lokal. *Jurnal Studi Pemerintahan*, 3(1), 116–134.
- Hanafi, M. A., Suntoro, I., & Nurmalisa, Y. (2018). Rasionalitas Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Gubernur Lampung 2018 Di SMA Negeri 1 Kotagajah. *Jurnal Kultur Demokrasi*, 5(13), 1–14.
- Jati, W. R. (2022). Perilaku Memilih Rasional dalam Pemilu Indonesia Kontemporer: Perbandingan Pemilu 2014 dan Pemilu 2019. *JAP: Jurnal Adhyasta Pemilu*, 5(2), 70–84.
- Kersting, N., & Baldersheim, H. (2004). *Electronic Voting and Democracy: A Comparative Analysis*. Basingstoke, England: Palgrave Macmillan.
- Lestari, E. Y., & Arumsari, N. (2018). Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Walikota Semarang Di Kota Semarang. *Integralistik*, 29(2), 63–72.
- Mahpudin. (2019). Teknologi Pemilu, Trust, dan Post Truth Politics: Polemik Pemanfaatan SITUNG (Sistem Informasi Penghitungan Suara) Pada Pilpres 2019. *Jurnal PolGov*, 1(1), 157–197.
- Malian, S. (2004). Menakar Loyalitas dan Volatilitas Pemilih Pada Pemilu 2004. *Unisia*, 51, 79–85. <https://doi.org/10.20885/unisia.vol27.iss51.art10>
- Mansyur, I. (2020). Rasionalitas Orientasi Politik Masyarakat Nelayan Kabupaten Pada Pemilihan Umum Legislatif. *Electoral Governance Thesis*, 2(2), 152–180.
- Maretha, T. A. (2020). Politik Transaksional dan Rasionalitas Pemilih dalam Pilpres 2019 di Kecamatan Karangnunggal. Thesis. Universitas Siliwangi.
- Prasetyo, K., & Kriswibowo, A. (2022). Public Trust pada Pemerintah Daerah dalam Penanganan Pandemi Covid-19. *Jurnal Governansi*, 8(1), 25–38.
- Ramadhani, A. G. (2021). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Kapuas Tahun 2018 (Studi di Kelurahan Mandomai Kecamatan Kapuas Barat). Skripsi. Universitas Lambung

Mangkurat.

Ritzer, G. (2012). *Teori Sosiologi dari Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern* (8th ed.). Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R & D*. Bandung: Alfabeta.

Sulistiyowati, D., Yakub, A., & Ariana. (2021). Refleksi Partisipasi Pemuda Sebagai Penyelenggara Pemilu 2019 di Kabupaten Sidenreng Rappang Menuju Pemilu 2024. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(8), 3772–3781. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i8.3769-2548-1398>

Wahyudi, H., Fernando, T., Ahmad, A., Khairani, A., Fatimah, Agung, I. M., & Milla, M. N. (2013). Peran Kepercayaan politik dan Kepuasan Demokrasi terhadap Partisipasi Politik Mahasiswa. *Jurnal Psikologi UIN Sultan Syarif Kasim Riau*, 9(2), 94–99. <https://doi.org/10.24014/jp.v9i2.171>

Wance, M., & Suhu, B. La. (2019). Partisipasi Pemilih Pemula Dalam Menentukan Pilihan Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah Maluku Utara. *Jurnal of Government - Jog*, 4(2), 91–115.

Wardhani, P. S. N. (2018). Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum. *Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 57–62. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v10i1.8407>